

BAB IV

Analisis Issu Strategis

4.1 Permasalahan Pembangunan

4.1.1. Permasalahan Kebutuhan Dasar

A. Pendidikan

1. Masih didapati anak usia sekolah yang tidak sekolah dan putus sekolah.
2. Tidak meratanya sebaran kualitas pendidikan di setiap kecamatan
3. Rendahnya kualitas proses belajar mengajar karena terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan.
4. Distribusi guru dan tenaga pendidik yang belum merata antar daerah khususnya pedesaan.

B. Kesehatan

1. Kualitas infrastruktur dan layanan kesehatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu belum terstandar.
2. Kualitas tenaga para medis seperti bidan desa dan perawat masih rendah.
3. Kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah dan puskesmas rendah.

C. Kebudayaan dan Pariwisata

1. Kurangnya penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata sedangkan potensi objek wisata besar.

2. Kurangnya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal.
3. Terbatasnya penyerapan dan pengembangan nilai-nilai local yang unggul guna menunjang percepatan pembangunan daerah.
4. Kurangnya upaya pengembangan dan pelestarian kawasan budaya dan benda cagar budaya yang terpadu dengan dunia usaha.

D. Pemuda dan Olahraga

1. Kurangnya minat pemuda untuk mengembangkan kewirausahaan guna menjadi pemuda mandiri.
2. Meningkatnya jumlah pemuda yang terlibat dalam kasus Narkoba.
3. Terbatasnya gerakan pengembangan budaya olah raga di kalangan masyarakat luas.
4. Belum optimalnya peran swasta dalam mendukung prestasi olah raga daerah.
5. Terbatasnya ruang publik yang layak digunakan untuk fasilitas olahraga masyarakat.

4.1.2. Permasalahan Infrastruktur Daerah

1. Kondisi rusak dan rusak berat pada jalan kabupaten di kabupaten Merangin masih cukup tinggi dan jalan tanah juga masih mendominasi. Sebaran jalan aspal dengan kualitas baik belum merata untuk semua kecamatan dan desa. Akibatnya, masih banyak masyarakat Desa yang belum menikmati kelancaran transportasi.
2. Masih terbatasnya infrastruktur pendukung dermaga untuk transportasi sungai dan jembatan.
3. Masih rendahnya rasio kelistrikan dan penyediaan air bersih khususnya di daerah pedesaan.

4.1.3. Permasalahan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

A. Pertanian

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura berupa jalan usahatani, benih/bibit unggul yang bermutu, alat dan mesin pertanian.
2. Daya saing pasar produk pertanian Tanaman Pangan yang relatif rendah akibatnya banyaknya lahan pangan berubah fungsi menjadi lahan perkebunan.
3. Kondisi infrastruktur pertanian yang kurang baik mengakibatkan meningkatnya biaya transportasi hasil pertanian meningkat dan posisi tawar petani rendah.
4. Akses petani terhadap permodalan masih terbatas terutama di daerah pedesaan.
5. Anggaran pembangunan pertanian belum mendapat alokasi dana yang cukup untuk memacu pembangunan pertanian.
6. Produktivitas hasil pertanian masih rendah karena keterbatasan kualitas input yang digunakan petani.

B. Pertambangan

1. Ketersediaan SDA berkurang diiringi kualitas dan daya dukung lingkungan menurun.
2. Pemanfaatan SDA tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam semakin menipis.

4.1.4 Permasalahan Perekonomian Daerah

1. Sumberdaya Ekonomi
2. Agroindustri belum berkembang dengan baik dalam rangka peningkatan nilai tambah dari komoditas unggulan pertanian, dan perkebunan.
3. Jumlah penduduk miskin yang cenderung meningkat. Dikarenakan terjadinya peningkatan angka garis kemiskinan. Peningkatan tersebut disebabkan terjadinya peningkatan biaya hidup yang terindikasi dari pula meningkatnya biaya kebutuhan pokok.
4. Pengangguran masih merupakan permasalahan ketenagakerjaan yang diwarnai oleh persoalan kemampuan daya serap tenaga kerja dan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan pencari kerja, serta kompetensi yang dimiliki dibandingkan apa yang dibutuhkan dunia usaha.
5. Investasi daerah belum maksimal pengembangannya yang mengindikasikan kurangnya daya tarik investor. Daya dukung infrastruktur, terbatasnya sistem pelayanan perizinan yang belum standar sehingga berdampak pada ekonomi biaya tinggi bagi investor.
6. Terjadinya alih fungsi lahan yang potensi tanaman pangan ke perkebunan sawit, sehingga terjadi penurunan luas baku lahan pertanian pangan.
7. Rendahnya produktivitas lahan dan terjadinya kesenjangan produktivitas karena teknologi yang digunakan, ketersediaan dan kualitas air masih belum sesuai kebutuhan.
8. Rendahnya tingkat kesejahteraan dan cukup tingginya angka kemiskinan petani tanaman pangan.
9. Transportasi antar kawasan sentra produksi maupun ke daerah pemasaran masih belum lancar akibatnya posisi tawar petani rendah sedangkan biaya produksi cenderung meningkat.

10. Usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi yang belum maksimal karena adanya permasalahan pada kemampuan sumber daya manusia dalam mengakses permodalan, dan kemampuan perluasan pasar.
11. Peranan Koperasi dan lembaga keuangan mikro yang masih rendah. Hal disebabkan pendekatan yang kurang tepat dalam pengembangan kelembagaan, dan terbatasnya gagasan baru.

B. Keuangan Daerah

1. Masih tingginya tingkat ketergantungan fiskal daerah Kabupaten Merangin terhadap pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan kecenderungan tingginya ketergantungan keuangan Kabupaten Merangin terhadap pemerintah pusat.
2. Masih rendahnya kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Ini berarti, belum optimalnya kinerja SKPD terkait dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
3. Terbatasnya jenis pajak dan retribusi yang dipungut dalam rangka peningkatan PAD. Belum maksimal upaya yang telah dilakukan berkenaan dengan kebijakan diversifikasi pajak dan retribusi daerah
4. Pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah belum maksimal. Pemanfaatan asset daerah harus dilakukan secara optimal dalam rangka peningkatan PAD.

4.1.5 Tata Pemerintahan

A. Politik

1. Pengetahuan politik masyarakat dan kemampuan berpolitik masih terbatas pada simbol-simbol fisik.
2. Keterwakilan perempuan dalam DPRD dan partisipasi politik masih rendah.

B. Pemerintahan Umum

1. Kualitas pelayanan publik oleh aparaturnya pemerintah daerah.
2. Belum optimalnya peran pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
3. Belum optimalnya peran Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam sistem pelayanan perizinan dan menekan biaya birokrasi bagi investor.
4. Belum optimalnya peran system e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
5. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Terutama dalam mentaati peraturan daerah.

4.2 Isu-Isu Strategis

4.2.1 Isu Strategis Kebutuhan Dasar

A. Bidang Pendidikan

1. Kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang masih rendah karena masih rendahnya kompetensi guru, dan keterbatasan infrastruktur pendidikan.
2. Kualitas dan penyebaran infrastruktur pendidikan yang kurang memadai terutama di pedesaan dan daerah tertinggal.
3. Minat dan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi masih rendah karena berbatasan pendapatan dan akses.
4. Distribusi tenaga pendidik yang tidak berkualitas proporsional antar Kecamatan maupun antara sekolah.
5. Rendahnya serapan dunia usaha untuk menerima tenaga kerja tingkat menengah karena kurang terampil dan kurang profesional dalam bekerja dan tidak sesuai dengan kebutuhannya.

B. Bidang Kesehatan

1. Derajat kesehatan masyarakat masih rendah yang ditandai oleh Indeks pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan yang masih terbatas khususnya pedesaan dan daerah tertinggal.
3. Kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan mengalami peningkatan tetapi belum dibarengi dengan peningkatan pelayanan kesehatan yang baik.

4.2.2. Isu Strategis infrastruktur

1. Kebutuhan listrik dan air yang berkualitas untuk masyarakat meningkat sedangkan pasokannya terbatas sehingga perlu peningkatan pasokan daya dengan membangun pembangkit listrik dan IPA baru.
2. Kondisi jalan dan jembatan yang rusak dan rusak berat pada jalan kabupaten perlu diperbaiki agar menjadi baik guna meningkatkan aktifitas ekonomi daerah.

4.2.3. Isu Strategis Bidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan

A. Pembangunan Pertanian

1. Kondisi geografis dan fisik daerah sangat potensial untuk pengembangan komoditi tanaman pangan dan hortikultura serta agrowisata.
2. Alih fungsi lahan potensial tanaman pangan menjadi perkebunan kelapa sawit.
3. Nilai tukar petani (NTP) masih rendah maka diperlukan intervensi pemerintah untuk meningkatkannya
4. Azas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan menjadi semakin penting untuk masa depan.

B. Pertambangan

1. Prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan masih terabaikan akibatnya terjadi kerusakan lingkungan hidup.
2. Fluktuasi harga komoditi tambang yang tinggi dan tergantung pada permintaan pasar internasional yang berakibat terhadap produksi komoditas tambang tersebut.

4.2.4. Isu Strategis Perekonomian Daerah

1. Daya dukung infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, dan air masih terbatas guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan investor.
2. Pengembangan industri hilir untuk komoditas unggulan berbasis kompetensi daerah masih belum optimal.
3. Kualitas sumberdaya manusia berbasis kompetensi daerah yang berorientasi pasar tenaga kerja masih rendah.
4. Upaya peningkatan investasi dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah masih terbatas.
5. Jumlah Persentase penduduk miskin cenderung meningkat, walaupun ekonomi tumbuh dengan baik.
6. Terjadinya alih fungsi lahan yang potensi tanaman pangan dan hortikultura perkebunan sawit, sehingga mengurangi produksi pangan.
7. Rendahnya produktivitas lahan.
8. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani dan cukup tingginya angka kemiskinan pada petani tanaman pangan karena nilai tukar petani masih rendah.
9. Infrastruktur transportasi antar kawasan sentra produksi maupun yang menuju ke daerah pemasaran masih belum baik.
10. Usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi yang kurang berkembang dengan baik, akibatnya daya saingnya masih rendah.

11. Kualitas lembaga koperasi dan lembaga keuangan mikro yang masih sangat rendah.

4.2.5 Issu Strategis Tata Pemerintahan

A. Politik

1. Rendahnya peran politik perempuan dalam lembaga-lembaga politik. Kendala yang dihadapi adalah kompetisi internal partai politik, dan kompetisi di antara perempuan itu sendiri. Kendala lainnya adalah budaya patriakal yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan.
2. Kinerja parpol belum optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu agregasi dan artikulasi politik, komunikasi politik, dan pendidikan politik. Selain itu Parpol pun menghadapi persoalan internal organisasinya.
3. Masyarakat masih terbatas dalam berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan mengawasi pembangunan karena terbatasnya penyediaan, pengelolaan, dan penyebaran informasi publik di daerah.

B. Pemerintahan Umum

1. Efektivitas peraturan daerah sampai dengan saat ini masih terkendala dengan masih adanya peraturan perundang-undangan ditingkat pusat yang tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir sehingga kesulitan dalam membuat aturan turunannya di tingkat peraturan daerah.
2. Upaya pencegahan KKN masih terkendala oleh belum optimalnya kapasitas pengelolaan manajemen keuangan dan pengawasannya karena keterbatasan jumlah dan kualitas pengelola keuangan dan auditor daerah.

3. Belum dapat menyediakan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
4. Masih terkendala dengan berbagai regulasi, sistem pelayanan investasi dan birokrasi pelayanan perizinan yang lambat dan mahal. Untuk itu diperlukan adanya berbagai kemudahan pelayanan investasi.
5. Belum optimalnya penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah yang ada saat ini masih terlalu besar berakibat pada besarnya biaya rutin dan terjadi tumpang tindih kewenangan.
6. Kesadaran hukum dan HAM masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM.